BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menghimpun hasil analisis keterkaitan variabel bebas Desentralisasi Fiskal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut lapangan usaha, dan Upah Minimum terhadap variabel terikat Ketimpangan Distribusi Pendapatan yang diukur dengan koefisien Gini di Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2023. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang artinya kemandirian fiskal daerah belum mampu mengatasi kesenjangan ekonomi secara efektif. Faktanya, daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran pembangunan, namun hal ini tidak secara otomatis menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan kewenangan fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di daerah tertinggal Jawa Timur. Selain itu, lemahnya kapasitas daerah dalam mengelola anggaran untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah juga mengurangi daya tarik investasi
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut ADHK Lapangan Usaha berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hal ini dapat terjadi ketika nilai PDRB menurut ADHK Lapangan usaha mengalami

peningkatan maka ketimpangan distribusi pendapatan juga akan meningkat, sehingga kesenjangan yang terjadi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin terasa. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu seperti pemilik modal atau pemilik usaha, sementara masyarakat miskin tidak merasakan pengaruh yang signifikan.

3. Upah minimum di Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa analisis secara rata-rata belum mampu menangkap perbedaan dampak UMR antar wilayah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak memisahkan analisis antara daerah dengan UMR tinggi yang umumnya membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, dengan daerah UMR rendah yang didominasi pekerja berketerampilan rendah. Keterbatasan ini mungkin menyebabkan tidak terdeteksinya pengaruh UMR yang sesungguhnya, karena dampak kebijakan upah minimum dapat berbeda antara wilayah dengan karakteristik pasar tenaga kerja yang berbeda. Selain itu, sebagian besar pekerja sektor informal masih belum tercover kebijakan upah minimum, sehingga kesenjangan antar kelompok pekerja tetap persisten.

5.2 Saran

1. Pemerintah Jawa Timur harus menerapkan kebijakan yang tepat untuk ketepatan sasaran alokasi dana agar mengurangi ketimpangan distribusi

pendapatan dan lebih menekankan pada pembangunan daerah sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan bahwa pembangunan ekonomi lokal akan tercapai sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan masyarakat, menarik investor melalui dukungan pendidikan, pengembangan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji hal yang lebih beragam dan menerapkan metodologi serta variabel independen lain yang belum banyak digunakan, seperti keuangan daerah, investasi, atau faktor lain yang dapat memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat mencerminkan situasi terkini dan menghasilkan hasil yang lebih beragam dan multifaset.